



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

TRIWULAN II



PALANGKA RAYA, JULI 2023

KATA PENGANTAR

Terselenggaranya Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan pra syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk hal ini diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Guna memenuhi hal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Triwulan II Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan II Tahun 2023 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan.

Selain berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan II Tahun 2023 juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta kepada masyarakat/publik.

Akhirnya dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah ini kami ucapkan terima kasih, semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Palangka Raya, Juli 2023

KEPALA BADAN,



Dr. H.M. KATMA F. DIRUN, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661022 199308 1 001

BAB I

KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, Badan Hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Misi Organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada masukan, keluaran, dan hasil.

Dari pengukuran kinerja akan dapat dilakukan penilaian proses penyusunan Kebijakan/ Program/Kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Adapun Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah pada Triwulan II Tahun 2023.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebelumnya, maka perlu dilakukan perhitungan untuk mengetahui capaian kinerja yang dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Rumus yang digunakan dalam menghitung capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pengukuran Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target RENJA 2023	Realisasi s.d TW II 2023	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah	78,50	79,30	101,02%
2	Meningkatnya Jumlah Ormas/LSM Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif	80%		
3	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan	200 orang	100 orang	50%
4	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLEKSOSBUD	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani)	80 %		
5	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	200 orang	130 orang	89%

1) Sasaran Strategis pertama : Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang Paham Terhadap Politik.

Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi

Kalimantan Tengah (Nilai/Angka). Pencapaiannya diketahui setelah ada penilaian pada tahun berikutnya. Upaya pencapaian IKU tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus partai politik.

Pencapaian nilai Indeks Demokrasi Indonesia, berdasarkan surat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor B-112/62520/VS.620/07/2023 Tanggal 10 Juli 2023, nilai IDI Kalimantan Tengah Tahun 2022 sebesar **79,30** dan masuk kategori **sedang**. IDI Kalimantan Tengah Tahun 2022 naik sebesar 6,13 poin jika dibandingkan dengan nilai IDI Tahun 2021 dan berada di peringkat 16 se Indonesia.

Salah satu pelaksanaan kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator target kinerja utama, terutama pada aspek kebebasan dan aspek kepastian lembaga demokrasi melalui pelaksanaan kegiatan penguatan Tim Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan arah kebijakan sasaran pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan aspek tersebut diatas.

Dukungan pelaksanaan kegiatan pembinaan / pendidikan politik kebangsaan pada Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan di 7 (tujuh) Kabupaten / Kota se Kalimantan Tengah akan memberikan kontribusi peningkatan pemahaman tentang aspek kebebasan dan

aspek kepastian lembaga demokrasi. Pada bulan Juni Tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan kegiatan Pendidikan Politik Kebangsaan di 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Kapuas, dengan jumlah peserta di masing-masing kabupaten sebanyak 70 (tujuh puluh) orang di Kabupaten Kotawaringin Barat dan 80 (delapan puluh) orang di Kabupaten Kapuas. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga negara khususnya pemuda, pelajar, mahasiswa, tokoh agama, tokoh Masyarakat, tokoh adat, organisasi kepemudaan, dan LSM/Ormas dalam berdemokrasi berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI terutama dalam menyampaikan aspirasi/ide/saran yang beretika berbudaya dan santun dalam menggunakan hak dan kewajibannya menjelang Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 mendatang.

Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah juga memberikan pembinaan kepada 11 (sebelas) Partai Politik penerima Hibah Bantuan Kepada Partai Politik, dengan harapan partai politik dapat memanfaatkan dana hibah tersebut untuk kegiatan yang mendukung pendidikan politik kepada Masyarakat.

Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah, 2021-2022

Deskripsi		2021	2022	Kategori
IDI Komposit		73,17	79,30	SEDANG
Aspek 1	Kebebasan	76,09	82,05	TINGGI
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	100,00	89,81	-
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	48,32	74,52	-
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	65,55	83,01	-
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	93,33	100,00	-
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	48,67	48,67	-
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	88,97	88,80	-
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	81,52	83,23	-
Aspek 2	Kesetaraan	75,07	77,61	SEDANG
8	Kesetaraan Gender	100,00	100,00	-
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	88,89	100,00	-
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	57,50	55,67	-
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	66,75	61,87	-
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	95,47	95,74	-
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	63,52	80,38	-
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	69,32	69,45	-
Aspek 3	Kapasitas Lembaga Demokrasi	68,02	78,62	SEDANG
15	Kinerja Lembaga Legislatif	40,00	35,00	-
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	89,52	86,97	-
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	93,33	93,33	-
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	63,33	96,67	-
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	75,11	76,62	-
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	57,14	71,43	-
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	70,60	69,80	-
22	Pendidikan Politik pada kader partai politik	38,18	100,00	-
Peringkat		26	16	



2) Sasaran strategis kedua : Meningkatnya Jumlah Ormas/LSM yang terlibat dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sasaran strategis ini dicapai melalui indikator kinerja utama yaitu Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif (Persen). Indikator kinerja ini dicapai melalui program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Pada Triwulan I Tahun 2023, bidang terkait melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Pelayanan Tata Kelola dan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan yang diadakan di Aula Eka Hapakat Lantai 3 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah yang diikuti peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang yang merupakan pejabat administrator / pengawas / fungsional / pelaksana teknis yang membidangi Tata Kelola dan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se Kalimantan Tengah. Kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

- 1) Sebagai salah satu upaya konstruktif dalam membangun kembali peran Ormas melalui Pelayanan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan yang merupakan pintu gerbang bagi legalitas dan pengakuan Pemerintah terhadap keberadaan Ormas,
- 2) Salah satu upaya mengoptimalkan pelayanan pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum, sekaligus upaya menciptakan tertib administrasi dalam pengelolaan data Ormas,
- 3) Sinergitas Koordinasi dan kerja sama yang baik serta standar dan persepsi yang sama sehingga mampu

memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat dan dalam menyikapi permasalahan sosial kemasyarakatan, mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada Tanggal 12 Juni 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Silaturahmi Kerukunan Umat Beragama dalam Rangka Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 yang Aman, Damai dan Harmoni di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur. Kegiatan ini sebagai upaya dalam koordinasi, sinergitas dan kerja sama seluruh komponen masyarakat dan peran dan tugas fungsinya masing-masing dalam rangka mensukseskan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

3) Sasaran Strategis Ketiga : Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa.

Sasaran ini dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan (orang). IKU tersebut diterjemahkan pelaksanaannya melalui program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Pada tanggal 23 Februari 2023 telah dilaksanakan kegiatan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menjaga Pemilu Serentak Tahun 2024 yang Damai dan Berkeadilan yang diikuti oleh 100 orang peserta yang merupakan Siswa/i SMA/SMK yang ada di Palangka Raya beserta guru pendampingnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan kepada

peserta tentang nilai-nilai Pancasila dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjadikan sumber daya manusia Indonesia khususnya generasi muda di Kalimantan Tengah agar berwawasan Pancasila, memiliki jiwa Nasionalisme dan Patriotisme, memberikan arah kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan dan fasilitasi dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, Menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda bahwa Pancasila adalah Ideologi yang mempersatukan NKRI.

Pada tanggal 06 Maret 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dengan tema **“Pemberdayaan dan Penguatan Bela Negara dalam Menjaga Pemilu dan Pilkada Serentak yang Damai dan Berkeadilan”** yang diikuti oleh 100 orang peserta yang merupakan perwakilan dari Resimen Mahasiswa universitas/Institut/Sekolah Tinggi yang ada di Palangka Raya, Banser NU, PPI, FKPPI, Pemuda Pancasila, BATAMAD, GERDAYAK, DUSMALA. Kegiatan ini bertujuan untuk :

- a) Membangun sikap dan perilaku serta karakter setiap warga negara Indonesia yang cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara serta nantinya memiliki kemampuan awal Bela Negara,

b) Meningkatkan pengetahuan, memiliki tekad, sikap dan perilaku serta Tindakan bela negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, nilai dasar bela negara, dan nilai dasar kewarganegaraan dalam rangka membentuk karakter bangsa yang ulet, Tangguh, berwawasan kebangsaan dan memiliki kesadaran bela negara dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara.

4) Sasaran Strategis Keempat : Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLEKSOSBUD.

Sasaran strategis ini dicapai melalui indikator kinerja utama yaitu Potensi Terjadinya Konflik Terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentasi Kasus yang telah Ditangani). Indikator kinerja ini dicapai melalui program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 16 Maret 2023 melaksanakan kegiatan rapat Fasilitasi Pengendalian Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial (RAD PKS) yang bertempat di Aula Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Gedung C Kementerian Dalam Negeri RI. Acara ini diikuti oleh perwakilan dari Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam Penyusunan dan Pelaporan RAD-PKS Kabupaten/Kota dan RAD-PKS Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dapat berjalan sesuai ketentuan serta mendorong pelaksanaan

Penanganan Konflik Sosial di daerah agar lebih maksimal dan tepat arah.

5) Sasaran Strategis Kelima : Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sasaran strategis ini dicapai melalui indikator kinerja utama yaitu jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (orang). Indikator kinerja ini dicapai melalui program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Semester I Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Pada bulan Maret 2023 telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se Kalimantan Tengah Tahun 2023 yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang merupakan pejabat administrator / pengawas / fungsional / pelaksana teknis yang membidangi Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut merupakan upaya optimalisasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika dengan cara meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat yaitu dengan membuka ruang bagi semua pemangku kepentingan terkait di daerah dan pemanfaatan seluruh potensi dalam rangak P4GN dan PN, dan meningkatkan sinergitas, koordinasi dan kerja sama yang baik serta membangun persepsi dan komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika di daerah khususnya dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah P4GN dan PN.

- 2) Pada Tanggal 29 Mei 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Sosialisasi P4GN Goes to School bertempat di Aula SMK N 1 Palangka Raya dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang yang merupakan murid dan guru pendamping SMK N 1 Palangka Raya.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk membentuk generasi muda sebagai Agen Perubahan, Panutan dan Role Model dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan pemberantasan Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dengan cara memberikan pemahaman aau penguatan bagi generasi muda sebagai agen perubahan dalam membangun bangsa mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam mendukung Pembangunan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga

mewujudkan generasi muda Sehat dan Cerdas tanpa Narkoba.

BAB II

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kendala dan Permasalahan

Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2023, dari segi pencapaian kinerja yang akan dicapai, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai jadwal, namun ada beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi,
- b. Untuk Kegiatan rutin kantor, realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

B. Tindak Lanjut Penyelesaian

Untuk mengatasi kendala yang terjadi selama Triwulan II Tahun Anggaran 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

- a. Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait seperti FKUB, FKDM dan FPK untuk berdialog membahas isu-isu strategis daerah dalam rangka memberikan rangkaian konsep pemikiran/rekomendasi kepada pimpinan untuk proses pengambilan kebijakan dalam mendukung tercapainya Kalteng Makin Berkah serta visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,
- b. Meningkatkan fungsi keberadaan website Kesbangpol dalam menyajikan data-data yang dimiliki agar dapat berfungsi sebagai sarana sumber data dan informasi terkait tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Hasil dari capaian sasaran strategis yang telah dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023:

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah pada triwulan II tahun 2023 dalam kategori baik, namun harus diakui masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi karena itu untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan II Tahun 2023 disusun, dengan harapan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana berakuntabilitas sesuai amanat yang telah diemban dan menjadi sarana umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

LAMPIRAN

**CAPAIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**

a. Laporan Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target RENJA 2023	Realisasi s.d TW II 2023	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah	78,50	79,30	101,02%
2	Meningkatnya Jumlah Ormas/LSM Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif	80%		
3	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan	200 orang	100 orang	50%
4	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLEKSOSBUD	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani)	80 %		
5	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	200 orang	130 orang	89%

b. Laporan Keuangan Penunjang Kinerja

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	11.393.254.909	11.393.254.909	4.587.938.844	40,27	
3	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.569.914.900	2.569.914.900	372.094.450	14,48	
4	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	7.009.143.400	7.009.143.400	5.983.795.950	85,37	
5	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3.263.514.000	3.263.514.000	234.014.577	7,17	
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.662.060.250	1.662.060.250	150.165.408	9,03	
7	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2.411.546.100	2.411.546.100	324.495.384	13,46	